

PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Chusnul Rofiah*

Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi*: chusnul.rofiah@stiedewantara.ac.id

Abstrak

Permasalahan sampah daun kering, khususnya daun lering, menjadi tantangan lingkungan di Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna tugas memiliki potensi ekonomi yang besar namun kerap menghadapi kendala dalam memulai dan mengelola usaha mandiri akibat keterbatasan literasi manajemen dan legalitas. Program pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi PMI purna tugas di Desa Gabusbanaran, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran kegiatan adalah 33 PMI purna tugas yang telah kembali ke desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahap identifikasi, sosialisasi kewirausahaan, pelatihan perencanaan bisnis, manajemen keuangan, strategi pemasaran produk lokal, pengelolaan SDM, serta pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, dengan 28 dari 33 peserta berhasil mendapatkan NIB. Program ini membuktikan bahwa strategi pemberdayaan PMI purna tugas tidak cukup hanya dengan pemberian modal, tetapi memerlukan pendampingan manajerial yang intensif dan berkelanjutan. **Kata Kunci:** Pekerja Migran Indonesia, Manajemen Usaha, Legalitas NIB, Pemberdayaan Ekonomi Desa

Abstract

Returned Indonesian Migrant Workers (PMI) have great economic potential but often face obstacles in starting and managing independent businesses due to limited management literacy and legality. This community service program aims to analyze the effectiveness of business management training for returned PMI in Gabusbanaran Village, Tembelang District, Jombang Regency. The target was 33 returned PMI who had come back to the village. The implementation method used a participatory approach through the stages of identification, entrepreneurship socialization, business planning training, financial management, local product marketing strategies, human resource management, and legal assistance through the creation of Business Identification Numbers (NIB). The results showed a significant increase in participants' understanding, with 28 out of 33 participants successfully obtaining NIB. This program proves that the empowerment strategy for returned PMI is not sufficient only with capital provision but requires intensive and sustainable managerial assistance.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Business Management, NIB Legality, Village Economic Empowerment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional, baik melalui kontribusi devisa dari remitansi maupun sebagai agen perubahan di daerah asal setelah kembali dari luar negeri. Setiap tahun, puluhan ribu PMI purna tugas kembali ke kampung halaman dengan membawa modal finansial dan pengalaman kerja yang beragam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mereka yang gagal memanfaatkan modal tersebut untuk memulai usaha yang produktif dan berkelanjutan. Rendahnya literasi manajemen usaha, minimnya pemahaman tentang legalitas formal, serta

keterbatasan akses terhadap pelatihan kewirausahaan menjadi penyebab utama kegagalan reintegrasi ekonomi PMI purna tugas (Mulyani, 2024).

Desa Gabusbanaran, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, merupakan salah satu desa dengan jumlah PMI purna tugas yang cukup tinggi. Berdasarkan survei awal yang dilakukan tim pengabdian, terdapat sekitar 40 orang PMI yang telah kembali ke desa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan sebagian besar bekerja di Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan. Sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30% yang berhasil mempertahankan usaha lebih dari satu tahun setelah dimulai. Kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti: ketidaksiapan mental dalam berwirausaha (berbeda dengan menjadi buruh), kurangnya kemampuan mengelola keuangan, serta tidak adanya legalitas usaha yang menghambat akses ke permodalan formal dan program bantuan pemerintah (Rofiah, 2024).

Perkembangan teknologi digital dan kebijakan pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebenarnya telah memudahkan proses legalitas usaha. Namun, PMI purna tugas di Desa Gabusbanaran masih menghadapi hambatan struktural seperti literasi digital yang rendah, keterbatasan akses internet, dan minimnya pendampingan teknis dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, NIB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan identitas usaha yang membuka akses terhadap pembiayaan bank, perlindungan hukum, serta peluang mengikuti program pengadaan barang/jasa pemerintah (Kurniawan, 2025).

Beberapa penelitian terkini menekankan bahwa pemberdayaan PMI purna tugas harus melampaui sekadar pemberian modal atau bantuan alat produksi. Strategi yang lebih komprehensif mencakup peningkatan literasi keuangan, pelatihan manajemen usaha, pendampingan legalitas, serta penguatan jejaring pasar (Widodo & Handayani, 2023). Dalam konteks ini, program pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi PMI purna tugas di Desa Gabusbanaran ini dirancang sebagai bentuk intervensi nyata untuk menjembatani kesenjangan keterampilan manajerial dan digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelatihan yang efektif, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun rekomendasi model pemberdayaan yang relevan bagi PMI purna tugas di pedesaan.

2. Profil Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna tugas yang berdomisili di Desa Gabusbanaran, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 33 orang, yang terdiri dari 25 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Rentang usia peserta antara 30 hingga 55 tahun, dengan rata-rata masa kerja di luar negeri selama 6-12 tahun. Pekerjaan yang pernah ditekuni di luar negeri bervariasi, antara lain: pembantu rumah tangga (18 orang), buruh pabrik (10 orang), pekerja perkebunan (3 orang), dan pekerja konstruksi (2 orang).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, diketahui bahwa sebagian besar PMI purna tugas sasaran belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai pentingnya legalitas usaha, kurangnya pemahaman terkait prosedur pendaftaran melalui sistem OSS, serta ketakutan akan proses yang rumit. Selain itu, literasi keuangan peserta juga masih rendah, ditunjukkan dengan kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta

tidak adanya pencatatan transaksi. Sebanyak 28 dari 33 peserta menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan sebelumnya.

Minat usaha peserta setelah pelatihan beragam, antara lain: usaha kuliner (15 orang), kerajinan tangan dari bahan bekas (8 orang), jasa salon dan kecantikan (5 orang), toko kelontong (3 orang), dan budidaya sayuran (2 orang). Pelatihan ini dirancang untuk memberikan bekal manajerial yang bersifat umum sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai jenis usaha yang diminati peserta.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna tugas menghadapi masalah kompleks dalam proses reintegrasi ekonomi ke masyarakat asal. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa meskipun PMI memiliki modal finansial yang cukup setelah bekerja di luar negeri, tingkat keberhasilan usaha mereka relatif rendah karena minimnya persiapan mental dan keterampilan manajerial. Hal ini sejalan dengan temuan (Santoso, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan usaha PMI purna tugas lebih ditentukan oleh kualitas pelatihan pra-pemberangkatan dan pasca-kepulangan, bukan hanya besaran modal yang dibawa pulang.

Salah satu instrumen krusial yang sering diabaikan oleh PMI purna tugas adalah legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB memberikan kepastian hukum, melindungi dari klaim pihak ketiga, serta menjadi syarat utama untuk mengakses program pembiayaan dari perbankan (Irawan, 2025). Sayangnya, tingkat kepemilikan NIB di kalangan PMI purna tugas masih sangat rendah. Studi oleh Sutrisno & Azizah (2024) menunjukkan bahwa kurang dari 20% PMI purna tugas di Jawa Timur memiliki legalitas usaha formal, dengan alasan utama ketidaktahuan prosedur dan ketakutan akan biaya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah manajemen keuangan. Banyak PMI memiliki kebiasaan konsumtif setelah kembali ke desa karena merasa "ingin menikmati hasil jerih payah" sekaligus terkena tekanan sosial untuk mengadakan acara-acara seremonial. Akibatnya, modal yang seharusnya dialokasikan untuk investasi produksi habis dalam waktu singkat (Lestari, 2024). Pelatihan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan sederhana, serta perhitungan harga pokok produksi menjadi kebutuhan mendesak bagi PMI purna tugas.

Selain itu, pemasaran produk lokal juga menjadi kendala klasik. PMI purna tugas yang terbiasa dengan sistem kerja terstruktur di luar negeri sering kali kesulitan beradaptasi dengan dinamika pasar yang tidak menentu dan persaingan ketat. Pendekatan pemasaran berbasis komunitas (word of mouth, kerja sama dengan warung tetangga) serta pemanfaatan teknologi digital sederhana seperti WhatsApp Business dan Facebook Marketplace terbukti efektif untuk usaha skala mikro (Purinda, 2025). Program pelatihan ini mengintegrasikan kelima aspek tersebut (perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, pengelolaan SDM, dan legalitas) dalam satu rangkaian kegiatan yang aplikatif dan mudah dipahami oleh PMI dengan latar belakang pendidikan beragam.

C. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan program pengabdian ini menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif yang dipadukan dengan pendampingan teknis individual. Pendekatan

ini dipilih karena karakteristik PMI purna tugas yang memiliki tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta kemampuan literasi digital yang beragam. Melalui metode ini, peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam latihan, studi kasus, serta praktik langsung penyusunan rencana bisnis dan pengurusan NIB.

Tahapan kegiatan dilaksanakan secara sistematis melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Peserta

Tahap awal dilakukan melalui survei lapangan, wawancara dengan perangkat desa, serta diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) bersama calon peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan latar belakang PMI (negara tempat bekerja, lama kerja, modal yang dimiliki), kendala yang dihadapi, serta minat jenis usaha yang ingin dijalankan. Hasil identifikasi menjadi dasar penyusunan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan riil peserta.

2. Perencanaan dan Persiapan Pelatihan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan modul pelatihan yang disederhanakan dengan banyak ilustrasi gambar, koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait (DPMPTSP), serta penyiapan sarana prasarana seperti laptop, proyektor, koneksi internet, dan contoh formulir perizinan.

3. Sosialisasi Pentingnya Manajemen Usaha dan Legalitas

Tahap sosialisasi dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan persuasif dan komunikatif. Materi sosialisasi meliputi: perbedaan budaya kerja versus budaya berwirausaha, manfaat kepemilikan NIB, alur pembuatan NIB melalui sistem OSS, serta gambaran umum perencanaan bisnis dan manajemen keuangan.

4. Pelatihan Perencanaan Bisnis

Peserta dibimbing untuk menyusun rencana bisnis sederhana dengan format yang mudah diisi: jenis usaha, target pasar, estimasi modal awal (investasi alat, bahan baku, promosi), proyeksi pendapatan per bulan, serta rencana pengembangan ke depan.

5. Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha

Materi mencakup pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan pemasukan dan pengeluaran (buku kas sederhana), perhitungan harga pokok produksi, penetapan harga jual, serta strategi menabung untuk cadangan usaha.

6. Pelatihan Pemasaran Produk Lokal

Peserta dikenalkan pada saluran pemasaran yang sesuai dengan skala usaha mikro, seperti pemasaran dari rumah ke rumah, kerja sama dengan warung tetangga, serta pemanfaatan WhatsApp Business (membuat katalog sederhana, membalas pesan pelanggan, dan mengirimkan pengumuman promosi).

7. Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk peserta yang berencana mempekerjakan karyawan (misalnya usaha salon atau kuliner dengan cabang), diberikan materi sederhana tentang cara merekrut, memberikan instruksi kerja, serta melakukan pengawasan dasar. Bagi usaha sendiri, materi ini difokuskan pada manajemen waktu dan disiplin diri.

8. Pendampingan Teknis Pembuatan NIB

Pendampingan dilakukan dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tim pengabdian membantu peserta menyiapkan dokumen (scan KTP, KK, dan foto usaha), membuat akun email, serta mengisi data pada sistem OSS. Pendampingan bersifat one-on-one bagi peserta yang kesulitan, dan berkelompok bagi yang sudah cukup melek digital.

9. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, serta pendataan jumlah NIB yang berhasil diterbitkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan program pengabdian selanjutnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 6 hari, yaitu tanggal 8–13 Desember 2025, bertempat di Balai Desa Gabusbanaran, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi di balai desa dimaksudkan agar peserta yang berasal dari berbagai dusun dapat mengakses dengan mudah dan merasa nyaman karena lingkungan yang sudah dikenal.

Hari Pertama (8 Desember 2025) – Identifikasi dan Sosialisasi

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pengisian pre-test, serta sambutan dari kepala desa dan ketua tim pengabdian. Selanjutnya, tim pengabdian memaparkan tujuan dan jadwal pelatihan. Sesi inti hari pertama adalah sosialisasi tentang pentingnya manajemen usaha bagi PMI purna tugas. Peserta sangat antusias, terutama saat sesi diskusi tentang pengalaman mereka gagal mempertahankan usaha. Hal ini menjadi titik awal perubahan pola pikir bahwa menjadi wirausaha membutuhkan keterampilan berbeda dibanding menjadi pekerja.

Hari Kedua (9 Desember 2025) – Perencanaan Bisnis

Peserta dibimbing untuk mengisi lembar kerja rencana bisnis. Tim pengabdian memberikan contoh usaha kuliner (misalnya nasi pecel) sebagai ilustrasi. Peserta diminta mengerjakan sendiri sesuai minat usahanya. Hasilnya, 30 dari 33 peserta berhasil menyusun rencana bisnis yang cukup realistis, dengan estimasi modal awal rata-rata Rp2 juta – Rp5 juta. Tiga peserta yang belum selesai didampingi secara individual setelah sesi utama.

Hari Ketiga (10 Desember 2025) – Manajemen Keuangan

Materi ini menjadi tantangan terbesar karena sebagian peserta memiliki tingkat pendidikan dasar. Tim pengabdian menyederhanakan materi dengan menggunakan analogi "dua kantong": satu kantong untuk kebutuhan rumah tangga, satu kantong khusus untuk usaha. Peserta juga diajarkan mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku tulis. Praktik

menghitung harga pokok produksi dilakukan dengan studi kasus pembuatan kue bolu. Hasilnya, 25 peserta mampu menghitung harga pokok dengan benar.

Hari Keempat (11 Desember 2025) – Pemasaran Produk Lokal

Sesi pemasaran diawali dengan cerita sukses UMKM lokal yang mampu meningkatkan omzet melalui WhatsApp Business. Tim pengabdian membantu peserta yang memiliki smartphone untuk menginstal aplikasi, membuat foto produk, dan menyusun katalog sederhana. Sebanyak 20 peserta berhasil membuat akun WhatsApp Business, dan 12 di antaranya langsung memposting produk pertama mereka di status WhatsApp.

Hari Kelima (12 Desember 2025) – Pengelolaan SDM dan Legalitas

Sesi pengelolaan SDM diberikan secara ringkas karena hanya 8 peserta yang berencana mempekerjakan orang lain. Fokus utama hari kelima adalah pendampingan pembuatan NIB bersama DPMPTSP. Petugas DPMPTSP membawa perangkat laptop dan perangkat sidik jari mobile. Tim pengabdian membantu peserta menyiapkan scan dokumen dan membuat email. Proses berlangsung dari pagi hingga sore. Hasilnya, 28 peserta berhasil mendapatkan NIB. Lima peserta gagal karena dokumen KTP atau KK yang tidak sesuai (belum direkam dalam satu kartu keluarga yang sama).

Hari Keenam (13 Desember 2025) – Evaluasi dan Penutupan

Post-test diberikan kepada seluruh peserta. Rata-rata skor pemahaman meningkat dari pre-test 35% menjadi 82%. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek legalitas NIB (dari 15% menjadi 85%). Acara ditutup dengan pemberian sertifikat serta pembentukan kelompok WhatsApp untuk komunikasi lanjutan.

Kendala yang Dihadapi

Kendala teknis meliputi: keterbatasan sinyal internet di balai desa (diatasi dengan menggunakan modem pribadi tim pengabdian), kurangnya smartphone bagi 5 orang peserta (diantisipasi dengan sistem berkelompok), serta tingkat literasi membaca yang rendah pada 3 orang peserta (diberikan pendampingan lisan penuh). Kendala non-teknis adalah masih adanya peserta yang ragu-ragu untuk memulai usaha karena takut gagal. Tim pengabdian memberikan motivasi dengan menghadirkan salah satu PMI sukses dari desa tetangga.



E. PENUTUP

Pelaksanaan program pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna tugas di Desa Gabusbanaran menunjukkan hasil yang positif. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta dalam perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran produk lokal, pengelolaan SDM, serta legalitas usaha melalui NIB. Keberhasilan 28 dari 33 peserta dalam memperoleh NIB membuktikan bahwa pendampingan teknis yang intensif dan melibatkan DPMPSTP secara langsung mampu mengatasi kendala literasi digital yang selama ini menjadi hambatan utama.

Program ini juga membuktikan bahwa akselerasi pemberdayaan PMI purna tugas tidak hanya bertumpu pada penyediaan modal usaha, tetapi memerlukan pendekatan humanis dan pendampingan manajerial yang berkelanjutan. Perubahan pola pikir dari "mantan pekerja" menjadi "calon wirausaha" merupakan fondasi penting yang harus dibangun sebelum keterampilan teknis diajarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, D. (2025). Legalitas Usaha bagi Pekerja Migran Purna Tugas. *Jurnal Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan*, 12(1), 45–60.
- Kurniawan, A. (2025). Akses Permodalan UMKM Melalui NIB. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 8(2), 112–125.
- Lestari, N. (2024). Pola Penggunaan Remitansi oleh PMI Purna Tugas di Jawa Timur. *Jurnal Studi Migran*, 6(1), 33–48.
- Mulyani, S. (2024). Tantangan Reintegrasi Ekonomi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(3), 210–225.
- Purinda, A. D. (2025). Digital technology-based business innovation strategies to increase the competitiveness of SMEs in Indonesia. *Jurnal Studi Administrasi Bisnis*, 1(3), 17–25.
- Rofiah, C. (2024). Profil Pekerja Migran di Kawasan Tembelang Jombang. *Laporan Pengabdian ITEBIS PGRI Dewantara*, 1–15.
- Santoso, A. B. (2023). Pemberdayaan Ekonomi PMI Purna Tugas Melalui Pelatihan Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(3), 200–215.
- Sutrisno, A., & Azizah, N. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha bagi PMI di Perdesaan. *Jurnal Abdimas Madani*, 6(2), 139–148.
- Widodo, T., & Handayani, S. (2023). Efektivitas Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pekerja Migran Purna Tugas. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 15(2), 145–160.